

Perspektif Media *Online* Terhadap Kasus Pembangunan Permukiman di Kota Bekasi menggunakan Pendekatan Model *Agenda Setting*

Perspective of Online Media towards Settlement Development Case in Bekasi using Agenda Setting Models

Tatik Yuniarti¹⁾, Amiruddin Saleh²⁾, Musa Hubeis³⁾, Rilus Kinseng⁴⁾

¹Fakultas Komunikasi, Sastra, dan Bahasa, Universitas Islam "45" Bekasi

¹Jl Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

^{2,3,4}Program Studi Komunikasi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor.

^{2,3,4}Gedung FEMA Wing 1 Level 5 Jalan Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

tyatiex@gmail.com¹⁾, amiruddin_ipb@yahoo.co.id²⁾, hubeis.musa@yahoo.co.id³⁾, rilus@apps.ipb.ac.id⁴⁾

Diterima: 25 Agustus 2017 || Revisi: 30 Januari 2018 || Disetujui: 12 September 2018

Abstrak – Pembangunan tidak selalu memberikan dampak positif terhadap sekitarnya tetapi juga dampak negatif. Perubahan sosial masyarakat adalah salah satunya dampak yang terjadi dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini untuk menganalisis bagaimana terjadinya pembangunan dan perubahan sosial masyarakat Bekasi dipandang dari perspektif wacana di media massa. Metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersumber dari berita di media massa. Berita-berita tersebut dianalisis dengan menggunakan bantuan *software Nvivo 11*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang dan evaluasi terhadap ijin pembangunan apartemen dan kawasan, karena hal tersebut memberikan dampak perubahan sosial yang besar terhadap masyarakat sekitarnya. Hasil pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa masyarakat sekitar banyak terkena dampak negatif dari pembangunan tersebut. Agenda media, agenda pemerintah, dan agenda publik memiliki hubungan dengan terjadinya perubahan sosial.

Kata Kunci: *agenda setting*, pembangunan Bekasi, perspektif media, perubahan sosial

Abstract - *Development does not always have a positive impact on the surroundings, but also negative impacts often occur. Social change of society one of them is the impact of the development. Therefore, the purpose of this study is to analyze how the development and social change of Bekasi society takes place from the perspective of discourse in the mass media. The method used is to use qualitative data analysis that comes from news in mass media. The reports were analyzed using Nvivo 11 software assistance. The results of the analysis revealed that the government needed to review and evaluate the permit for the development of apartments and the area, because it had a major social change effect on the surrounding community. From the news in mass media shows that the surrounding communities are much negatively affected by the development. The media agenda, the government agenda and the public agenda are related to the occurrence of social change.*

Keywords: *agenda setting, development of Bekasi, media perception, social change*

PENDAHULUAN

Seiring bertambahnya penduduk di Kota Bekasi, pembangunan sejumlah apartemen juga semakin meningkat. Dikutip dari beritasatu.com (Rusyanto, 2015), peningkatan pembangunan apartemen tersebut dipicu oleh beberapa aspek, antara lain pertumbuhan penduduk yang mencapai sekitar 3,6% per tahun dan persoalan lahan. Dari luas Kota Bekasi yang mencapai sekitar 21.049 hektare (ha), lahan yang dapat digunakan untuk hunian hanya sekitar 9.540 ha. Pada tahun 2015 lahan yang tersisa hanya 1.781 ha. Menurut Koswara yang saat itu menjabat Kepala Dinas Tata Kota Pemkot Bekasi, pembangunan hunian vertikal tidak dapat dielakkan mengingat kebutuhan akan

perumahan yang terus berkembang, sementara lahan semakin sempit. Pada sisi lain, tuntutan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) semakin meningkat. Menurutnya, pengembangan hunian vertikal telah dituangkan dalam Rencana Tata dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011-2031. Koswara mengatakan, pembangunan hunian vertikal akan banyak menyumbang RTH yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi. Untuk mewujudkannya, Pemkot Bekasi menuangkannya dalam persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh para pengembang. Bagi pengembang hunian vertikal yang berdiri sendiri, syarat RTH yang harus dipenuhi adalah 30% dari total luas lahan yang dimiliki. Sementara bagi pengembang

yang menggarap proyek properti terpadu (*mixed use*) persyaratannya adalah 20%. Pengembang yang diijinkan menurut Koswara adalah yang memiliki lahan seluas minimal 5.000 meter persegi. Saat ini setidaknya ada 30 proyek hunian vertikal atau apartemen di Kota Bekasi yang berkapasitas 50.135 unit. Selain itu, terdapat lima pengembang yang sedang dalam tahap pembenahan *siteplan*.

Head of Research Savills Property Connection Indonesia (PCI) Anton Sitorus menyatakan, meskipun pemerintah daerah memberikan ijin, namun pembangunan apartemen tersebut harus sesuai dan terencana dalam tata kota. Ia khawatir jika perencanaan yang kurang tepat akan berdampak negatif pada masalah sosial dan ekonomi. Hal itu seperti yang terjadi pada pembangunan apartemen Bintara Residence, Bekasi Barat. Seperti yang diberitakan *kompas.com*, pada 2016 lalu, ratusan warga Perumahan Griya Bintara Indah berunjuk rasa menolak rencana pembangunan apartemen tersebut. Mereka mewakili 3.000 keluarga penghuni tiga perumahan yang akan terdampak pembangunan apartemen, yakni Griya Bintara Indah, Pondok Cipta, dan Bintara Lika. Mereka menyatakan ijin prinsip pembangunan apartemen memang sudah keluar, tetapi warga tidak pernah diajak bicara. Dampak negatif yang dikhawatirkan warga adalah makin tingginya genangan air di musim hujan serta kesulitan air di musim kemarau. Dalam satu bulan saat pembangunan apartemen tersebut, sudah tiga kali permukiman mereka tergenang. Jika apartemen jadi dibangun, mereka khawatir genangan makin tinggi dan sering. Hal itu dikarenakan lokasi apartemen yang akan dibangun tersebut selama ini merupakan resapan dan penampungan air. Warga juga mengkhawatirkan dampak sosial bagi penghuni, seperti keramaian, kebisingan, ketidaknyamanan, narkoba, sampai kemacetan.

Sesuai izin prinsip, apartemen Bintara Residence yang akan dibangun PT. Jakarta Cipta Utama menempati lahan seluas 15.500 meter persegi. Di dalamnya termasuk 2.800 meter persegi lahan yang mestinya untuk fasilitas umum dan sosial (*fasum/fasos*) milik warga Griya Bintara. Sesuai *site plan* perumahan, lahan yang akan dibangun apartemen itu peruntukannya untuk kawasan niaga seperti ruko dan rukan, bukan untuk pembangunan apartemen (Suprihadi, 2016).

Selain banyaknya pembangunan apartemen, pengembang kawasan saat ini juga melihat Kota Bekasi

memiliki potensi pasar properti yang bagus, mengingat banyak ekspatriat yang kemudian tinggal di Bekasi. Kawasan yang saat ini sudah terbangun adalah Summarecon Bekasi, yang berada di Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara. Summarecon berhasil mengubah daerah yang sebelumnya kering menjadi bergeliat dengan usaha dan bisnis yang lahannya dikembangkan sampai akhir tahun 2016 lebih dari 500 hektar. Summarecon mengubah wilayah utara kota Bekasi menjadi kawasan hunian dan komersial metropolitan yang berkembang modern dengan dilengkapi pusat perbelanjaan, pusat perdagangan ritel, perkantoran dan hotel. Selain itu juga dilengkapi dengan ruang hijau yang luas, infrastruktur perkotaan dan fasilitas lain berupa lingkungan perumahan yang bernilai tinggi ini. Sejak pertama kali diluncurkan, Summarecon telah menjual tujuh klaster perumahan dengan total unit sekitar 1.700 rumah dan empat klaster ruko sebanyak 350 unit. Namun, permasalahan dampak dari pembangunan kawasan tersebut juga terjadi di wilayah utara Bekasi. Dampak tersebut adalah bertambahnya rumah warga sekitar kawasan Summarecon yang terkena dampak banjir. Warga Bekasi Utara meminta Pemerintah Kota Bekasi dapat memerhatikan dampak dari pembangunan, yaitu banjir yang terjadi di wilayah pemukiman RT 01 RW 02 Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara. Menurut Saidah, warga setempat, sejak tahun 2014 banjir mulai rutin terjadi di wilayahnya tersebut. Warga lainnya, Lina menambahkan banjir juga mengakibatkan sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) di Jalan Perjuangan Gang Duku 11 RT 06 RW02 Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara tergenang (Pramana, 2017).

Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018, permasalahan-permasalahan pembangunan daerah tersebut adalah kesenjangan harapan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan pada umumnya terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta adanya

peluang yang tidak termanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, media menjadi salah satu sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai pembangunan dan permasalahannya tersebut. Melalui media, masyarakat dapat mengetahui proses pembangunan berlangsung dan manfaatnya bagi mereka. Hasil penelitian D'Angelo, Pollock, Kiernicki, & Shaw (2013) tentang *framing* berita di Afrika tentang isu HIV/AIDS menyatakan bahwa sistem media yang demokratis dapat memfasilitasi tanggapan pada positifnya tingkat masyarakat yang lebih kuat daripada agenda media pada sistem media yang represif autokratik. Hal ini berarti pada sistem yang demokratis seperti yang juga berlaku di Indonesia menyatakan masyarakat dapat pula secara aktif memberikan tanggapan terhadap pemberitaan di media. Van den Akker, Fronek, Blyth, & Frith (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa media juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perubahan sosial dalam membangun keluarga, dan memiliki potensi untuk mempengaruhi tindakan masa depan mereka. Dalam penelitian yang dilakukan Dekker & Scholten (2017) menunjukkan bahwa *framing* media dapat menciptakan dinamika tertentu, seperti "David versus Goliat" dimana *framing* kepentingan manusia dari satu kasus menghadapi tantangan saat ini dengan Kebijakan, atau "dinamika negosiasi" di mana kerangka manajerial yang bersaing dinegosiasikan. Solusi kebijakan integrasi *framing* dan *agenda setting* membuat literatur membantu berkembang, sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang terjadinya efek media pada agenda kebijakan (*policy*) (Zulfikar, 2017).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *framing* terhadap pemberitaan di media menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana isi dan agenda dari berita-berita tersebut yang kemudian dapat berpengaruh pada kebijakan pemerintah dan perubahan sosial masyarakat. Isu pembangunan di Kota Bekasi menjadi salah satu yang saat ini diberitakan di media massa, khususnya media lokal karena dilatarbelakangi banyaknya permasalahan yang terjadi. Sebagai kota penyangga ibukota pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, namun banyak aspek yang kemudian merugikan sebagian warga masyarakat. Media massa melihat hal tersebut menjadi salah satu yang disoroti

agar pembangunan dapat adil dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, maka tujuan dari penyusunan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan apartemen dan pengembang kawasan terhadap perubahan sosial masyarakat, khususnya di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aspek penting yang dilihat dari kajian ini adalah dilihat dari wacana yang termuat di media massa. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi tumbuhnya pembangunan dan dampaknya terhadap perubahan sosial yang dipetakan dari wacana di media massa ?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Mc Quarrie, Marshall, & Rossman, 1990). Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan *brikolase*, yaitu serangkaian praktik yang disatupadukan dan disusun secara rapi sehingga menghasilkan solusi bagi persoalan dalam situasi nyata. Penelitian ini menurutnya menghasilkan sebuah ciptaan yang kompleks, padat, reflektif, dan mirip klip yang mewakili citra, pemahaman, dan interpretasi peneliti mengenai dunia atau fenomena yang sedang dianalisis. Hal itu menunjukkan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya adalah memahami dan memaknai apa yang terjadi pada individu, sebuah masyarakat, atau obyek lain (Denzin & Lincoln, 2009).

Analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif yang bersumber dari berita di media massa berjumlah 10 berita. Deskriptif yang dimaksudkan adalah membangun kerangka kerja keseluruhan untuk diikuti peneliti sepanjang studi. Apa yang disiratkan oleh pendekatan ini adalah pembentukan dan identifikasi orientasi teoritis yang dapat dijalankan sebelum menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Peneliti sudah menentukan sebelum permulaan penelitian secara pasti apakah unit analisa dalam penelitian ini.

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* Nvivo 11. Analisis teks dari pemberitaan di media *online* dilakukan untuk mengetahui *agenda setting* media dan hubungannya dengan agenda publik dan pemerintah. Di dalam NVivo, peneliti tidak perlu membuat salinan karena hasil dari proses *coding* tidak akan mengubah data asli

yang tersimpan di dalam *sources*. Dengan memakai fasilitas *nodes* dalam NVivo, proses membaca dan mengode data dapat dilakukan dengan mudah, cepat, namun tetap akurat. Selain itu, bagian dari data yang dikode akan langsung tersalin dalam tiap-tiap kategori sehingga dapat langsung melihat isi dari data yang terkode tanpa perlu membuka data asli (Bazeley & Jackson, 2013; Zamawe, 2015).

Pembangunan (*development*) adalah proses sosial yang direncanakan atau direkayasa. *Development* adalah sebuah akta yang intinya juga merupakan perubahan sosial. Rekayasa sosial model pembangunan ini memang terjadi besar-besaran di negara-negara dunia ketiga. Konsep pembangunan yang dinyatakan sebagai modernisasi adalah beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat tradisional. Teori pertumbuhan dari Rostow yang dipakai sebagai kebijakan ekonomi Indonesia selama 32 tahun orde baru juga berasal dari kalangan *developmentalis*. Jadi, selama 32 tahun orde baru telah melakukan rekayasa sosial dengan pola *developmentalis* (Rakhmat, 1999).

Selain memandang pembangunan dari model-model pertumbuhan berisikan indeks dan indikator ekonomi, standar hidup, pendapatan perkapita, GNP, para ekonom menyatakan bahwa pembangunan adalah beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, adanya rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern (Aryanti, 2018). Pembangunan berkisar pada bagaimana mengubah suatu masyarakat dengan mengubah sistem ekonominya. Pendukung teori pembangunan disebut *developmentalis* yang lazim berpegang pada ekonomi klasik (Rochajat & Elvinaro, 2011). Todaro (2000) menyatakan arti pembangunan sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan.

Tujuan dari pembangunan antara lain : (1) Mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap; (2) Meningkatkan pendapatan per kapita; (3) Mengadakan perubahan struktur ekonomi ;(4) Perluasan kesempatan kerja; (5) Pemerataan pembangunan; (6) Meningkatkan kemampuan nasional; (7) Pembinaan kelembagaan.

Sementara para sosiolog dan psikolog seperti Talcott Parson, David McClelland, Max Weber, Ivan Illich, dan Peter Berger memandang pembangunan dari

kerangka perubahan evolusioner/revolusioner dan adaptasinya mencakup transisi multilinear masyarakat yang sedang membangun untuk mengatasi masalah kemiskinan dan penegakan keadilan sosial. Para politikus seperti Karl Marx, Paul Baran, Andre Gunder Frank, Theodore Dos Santos, Samir Amin memandang pembangunan dari proses input, konversi, output dan umpan balik serta efek politik, pergolakan atau labilitas politik dan hubungan-hubungan kelembagaan struktur politik baik supra struktur maupun infra struktur politik serta hubungan politik antar negara (Abraham, 1991)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025 .

Quebral dan Gomez (1976) dalam Nasution (2002) mengatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial

yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi, dan itu komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Dalam komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberi laporan yang tidak realistik dari fakta-fakta atau sekadar penonjolan diri. Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis, (Quebral, 1988) merumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara.

Rogers (1986) menyatakan bahwa secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya, kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan yang merupakan proses, yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Jika dilihat dari segi ilmu komunikasi yang juga mempelajari masalah proses, yaitu proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat dan perilakunya. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya melibatkan minimal tiga komponen, yakni komunikator pembangunan, aparat pemerintah ataupun masyarakat, pesan pembangunan yang berisi ide-ide atau pun program-program pembangunan, dan komunikasi pembangunan, yaitu masyarakat luas, baik penduduk desa atau kota yang menjadi sasaran pembangunan.

Pembangunan di Indonesia adalah rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia, harus bersifat pragmatik, yaitu suatu pola yang membangkitkan inovasi bagi masa kini dan yang akan datang. Dalam hal ini fungsi komunikasi harus berada di garis depan untuk merubah sikap dan perilaku manusia Indonesia sebagai pemeran utama

pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan konsep komunikasi pembangunan, dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sementara dalam arti terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi.

Perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Contoh perubahan sosial antara lain revolusi nasional, pembentukan suatu lembaga pembangunan desa, pengapdosian metode keluarga berencana oleh suatu keluarga, dll. Perubahan baik pada fungsi maupun struktur sosial terjadi sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Struktur suatu sistem terdiri dari berbagai status individu dan status kelompok yang teratur. Berfungsinya status itu merupakan seperangkat peranan atau perilaku nyata seseorang dalam status tertentu. Status dan peranan saling memengaruhi satu sama lain (Rogers & Shoemaker dalam Hanafi, 1986).

Salah satu cara dalam meninjau perubahan sosial ialah dengan memerhatikan darimana sumber terjadinya perubahan itu. Jika sumber perubahan itu dari dalam sistem sosial itu sendiri, dinamakan perubahan imanen. Jika sumber ide baru berasal dari luar sistem sosial, yang demikian disebut perubahan kontak. Perubahan imanen terjadi jika anggota sistem sosial menciptakan dan mengembangkan ide baru dengan sedikit atau tanpa pengaruh sama sekali dari pihak luar dan kemudian ide baru itu menyebar ke seluruh sistem sosial. Perubahan kontak terjadi jika sumber dari luar sistem sosial memperkenalkan ide baru. Perubahan kontak adalah gejala antar "sistem". Ada dua macam perubahan kontak, yaitu perubahan kontak selektif dan perubahan kontak terarah. Perbedaan perubahan ini tergantung dari cara mengamati datangnya kebutuhan untuk berubah itu, dari dalamkah atau dari luar sistem sosial.

Perubahan kontak selektif terjadi jika anggota sistem sosial terbuka pada pengaruh dari luar dan

menerima atau menolak ide baru berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan sendiri. Tersajinya inovasi itu sendiri secara spontan atau kebetulan. Penerima bebas memilih, menafsir, atau menolak ide baru tersebut. Perubahan kontak terarah atau perubahan terencana adalah perubahan yang disengaja dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem sosial yang bertindak sebagai agen pembaharu yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga dari luar (Rogers & Shoemaker dalam Hanafi, 1986).

Perubahan dan pembangunan memiliki istilah yang tidak jauh berbeda namun keduanya memiliki dampak yang berbeda-beda disesuaikan dengan siapa yang akan diubah serta bagaimana perubahan tersebut akan dilaksanakan. Parameter perubahan terdiri atas parameter nominal dan parameter kelulusan yang merujuk pada perubahan secara struktural dan kultural di tengah-tengah masyarakat seperti terbentuknya grup-grup etnis, agama, dan gender. Selain itu, perubahan akan membentuk suatu tingkatan kategori masyarakat dari sisi status ekonomi, pendidikan, hingga prestise yang dimiliki seseorang.

Perubahan sosial memiliki beberapa tipe yang berbeda (Herper, 1989); (1) perubahan personal; (2) cara pembagian struktur yang saling berkaitan; (3) perubahan struktur; (4) perubahan hubungan antara struktur yang berbeda; (5) kemunculan struktur baru. Tiap-tiap tipe perubahan akan memunculkan suatu bentuk keseimbangan baru yang membawa dampak terhadap penerima perubahan. Kemunculan struktur-struktur baru ini secara otomatis akan menggeser keberadaan struktur lama. Beberapa pengamat kontemporer mengaku melihat sistem dunia muncul di mana terdapat tingkat seperti integrasi politik dan ekonomi bahwa keterpisahan dan kemerdekaan perekonomian mereka sedang sangat dibatasi, tingkat tersebutlah yang menunjukkan telah terjadinya perubahan struktur (Effendi, 2017)

Teori *agenda setting* dikemukakan pertama kali oleh Mc Comb dan Donald L. Shaw dalam *Public Opinion Quarterly* terbitan tahun 1972 berjudul *The Agenda Setting Function of Mass media*. Kedua pakar tersebut mengemukakan bahwa “jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.” Teori ini dilandasi oleh hasil studi mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968. Teori *Agenda setting* menggambarkan besarnya pengaruh media dan kemampuannya untuk “menceritakan” isu-

isu apa yang penting. Isu-isu atau individu yang dipilih media untuk dipublikasikan, akhirnya menjadi isu dan individu yang dipikirkan dan dibicarakan oleh khalayak (Griffin, 2006).

Pendekatan *agenda setting* dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai *gatekeeper*, yaitu mereka para wartawan, pemimpin redaksi, dan penyunting gambar. Dari *gatekeeper* inilah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Setiap isu diberi bobot tertentu, apakah dimuat di halaman muka sebagai *headline*, atau di halaman belakang di sebelah pojok atau bagaimana, sedangkan pada televisi, berapa lama penyiaran, berapa kali ditayangkan, dan sebagainya. Penonjolan isu-isu di media massa inilah yang disebut sebagai agenda media, yang akan berkorelasi atau berhubungan dengan agenda publik, yakni apa yang sedang dipikirkan dan dibicarakan orang ramai (*community salience*) (Subiako & Ida, 2012).

Teori *agenda setting* menjelaskan tujuan media dalam menyusun berita yang disampaikan pada masyarakat. Dengan demikian secara sepihak media massa melakukan seleksi apa yang dianggap penting. Sebagaimana media massa saat ini, sangat sulit membuktikan keseriusan media yang menampilkan berita yang memenuhi *cover both side* (McQuail, 1987). Littlejohn & Foss (2010) mengutip dari Rogers & Dearing menyatakan bahwa fungsi *agenda setting* merupakan proses linear yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, agenda media itu sendiri harus disusun oleh awak media. Kedua, agenda media dalam beberapa hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik. Ketiga, agenda politik yaitu apa yang dipikirkan para pembuat kebijakan politik yang berhubungan dengan kebijakan publik atau yang dianggap penting oleh publik.

Indikator dari ketiga agenda tersebut yaitu; (1) agenda media : isu yang dibahas oleh suatu media : Visibilitas (*visibility*): Jumlah dan tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita dan panjangnya (waktu dan ruang); tingkat penonjolan bagi khalayak (*audience salience*): relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak; valence (*valence* : cara pemberitaan dan cara penyajian dari suatu topik atau berita. (2) agenda publik: naluri publik terhadap pentingnya suatu isu; keakraban (*familiarity*): derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu; penonjolan pribadi (*personal salience*): relevansi kepentingan

individu dengan ciri pribadi; kesenangan (*favorability*): pertimbangan senang atau tidak senang dengan topik berita. (3) agenda politik: agenda publik memengaruhi pembuat keputusan politik; dukungan (*support*): kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu; kemungkinan kegiatan (*likelihood action*): kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan; kebebasan bertindak (*freedom of action*): nilai kegiatan yang dilakukan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan dan Perubahan Sosial

Pembangunan awalnya dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDB) (Rochajat & Elvinaro, 2011)

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pemerintah Kota Bekasi merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dapat dilihat bahwa RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 diarahkan untuk menjadi tahapan internalisasi dan aktualisasi menuju profil “Bekasi

Kota Kreatif yang Ihsan”. Di mana pada tahap internalisasi, sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia mendapat perhatian yang sangat besar, sedangkan pada tahap aktualisasi sektor ekonomi dan daya saing daerah adalah hal bidang yang menjadi perhatian utama. Untuk itu perhatian dan energi pada pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan diarahkan untuk mencapai hal tersebut. Prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2013-2018 terdiri dari 8 prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, yakni reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pembangunan infrastruktur pengelolaan keuangan daerah perekonomian pendidikan kesehatan kesejahteraan sosial keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan kedelapan prioritas tersebut, program pembangunan daerah Kota Bekasi dirumuskan secara komprehensif berdasarkan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun untuk dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan program kerja Pemkot Bekasi tersebut, pembangunan infrastruktur wilayah menjadi salah satu prioritas yang dilakukan. Program tersebut dilakukan dengan meningkatkan penataan, pengendalian, pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.

Berdasarkan 10 berita yang dijadikan objek penelitian dalam kajian ini, diperoleh data bahwa pembangunan yang diberitakan media massa di antaranya pembangunan infrastruktur tersebut banyak menjadi sorotan media, seperti tentang pembangunan hunian, pembangunan kawasan dan perekonomian, dan kawasan pedestrian. Lebih jelas mengenai 10 pemberitaan tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perumahan dan apartemen yang dilakukan di Kota Bekasi ternyata mengakibatkan dampak yang besar terhadap lingkungan sekitar. Media menyoroti pembangunan apartemen tersebut sehingga masyarakat semakin memprotes masifnya pembangunan yang dilakukan. Akan tetapi dari pemberitaan di media tersebut, pemerintah berusaha mengantisipasi banjir dan memperbanyak ruang terbuka hijau dengan pembangunan pedestrian.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan *software* Nvivo 11, terdapat beberapa hubungan antara pembangunan dan perubahan sosial dari berita-berita yang tercantum dalam Tabel 1. Teks berita yang dianalisis tersebut antara lain mengungkapkan faktor-faktor yang menghubungkan

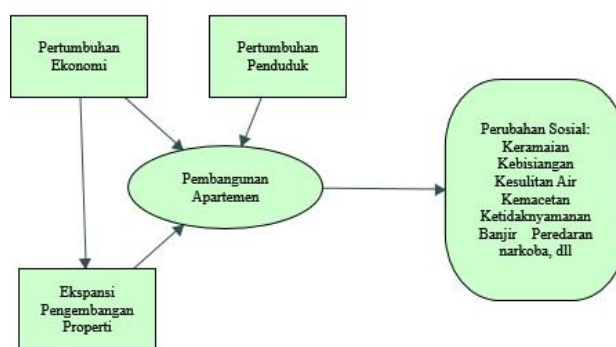
antara pembangunan dan perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut adalah adanya pertumbuhan penduduk, mendorong permintaan hunian vertikal (apartemen). Adanya ekspansi pengembang properti, pembangunan apartemen pun jadi meningkat. Namun pembangunan apartemen dan sejumlah kawasan bisnis dan perumahan di Bekasi tersebut mengakibatkan juga masalah pembangunan dan perubahan sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi hubungan masalah pembangunan dan perubahan sosial antara lain; pembangunan apartemen mengakibatkan rumah warga tergenang banjir dan kesulitan air di musim kemarau, karena kebutuhan air di apartemen otomatis meningkat dengan jumlah penghuni yang juga banyak, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi tangkapan air tanah di sekitarnya. Selain itu, dengan dibangunnya apartemen juga dikhawatirkan akan semakin menyebabkan terjadinya keramaian, kebisingan, ketidaknyamanan, peredaran narkoba, dan juga menambah kemacetan. Hal itu seperti keluhan warga yang pernah diberitakan di *Kompas.com* 30 Oktober 2016.

Tabel 1 Data Pemberitaan Media Massa

Nama Media	Topik pemberitaan		
	Judul Berita	Angle Berita	Penjola n agenda
Beritasatu.com	Proyek apartemen di Bekasi	Program pembangunan	Agenda media
Tempo.co	Banjir Bekasi	Dampak pembangunan	Agenda publik
Jabar.pojoksa tu.id	Bangunan liar dibongkar	Dampak pembangunan	Agenda publik
Kompas.com	Penolakan pembangunan apartemen	Dampak pembangunan	Agenda publik
Tribunnews.com	Warga tolak apartemen	Dampak pembangunan	Agenda publik
Republika.co.id	Pembangunan pedestrian	Program pembangunan	Agenda pemerintah
Berisatusatu.com	Pembangunan pedestrian	Program pembangunan	Agenda pemerintah
Gobekasi.co.id	Banjir Bekasi karena pembangunan perumahan	Dampak pembangunan	Agenda publik

Sumber : Diolah penulis dari berbagai sumber berita di media massa

Salah satu cara dalam meninjau perubahan sosial ialah dengan memerhatikan darimana sumber terjadinya perubahan itu. Jika sumber perubahan itu dari dalam sistem sosial itu sendiri, dinamakan perubahan imanen. Jika sumber ide baru berasal dari luar sistem sosial, yang demikian disebut perubahan kontak. Perubahan sosial yang terjadi karena dampak pembangunan tersebut bersumber pada faktor dari luar sistem, sehingga dinamakan perubahan kontak. Pembangunan apartemen yang dilakukan oleh pengembang merupakan faktor dari luar, karena perubahan sosial terjadi setelah ada pembangunan. Secara bagan hubungan pembangunan dan perubahan sosial dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Hubungan Pembangunan dan Perubahan Sosial (Sumber : Data diolah dengan Nvivo 11)

Perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terjadi akibat dari pembangunan apartemen di Bekasi antara lain semakin terjadinya keramaian, kebisingan, kesulitan air, kemacetan, ketidaknyamanan, banjir dan peredaran narkoba.

Selain pembangunan apartemen, pembangunan kawasan bisnis dan perumahan serta pedestrian juga menjadi salah satu yang dilakukan di Kota Bekasi. Dari analisa dengan menggunakan Nvivo 11 dari teks berita media didapatkan hasil bahwa pembangunan kawasan bisnis dan perumahan menyebabkan meluapnya banjir di Kali Bekasi, sehingga kejadian luar biasa (KLB) pernah direkomendasikan lantaran tinggi muka air kiriman mencapai lima meter. Banjir yang kerap terjadi di bantaran Kali Bekasi tersebut disebabkan banyaknya hunian yang dibangun di kawasan tersebut yang sebenarnya harus difungsikan sebagai cekungan air.

Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial

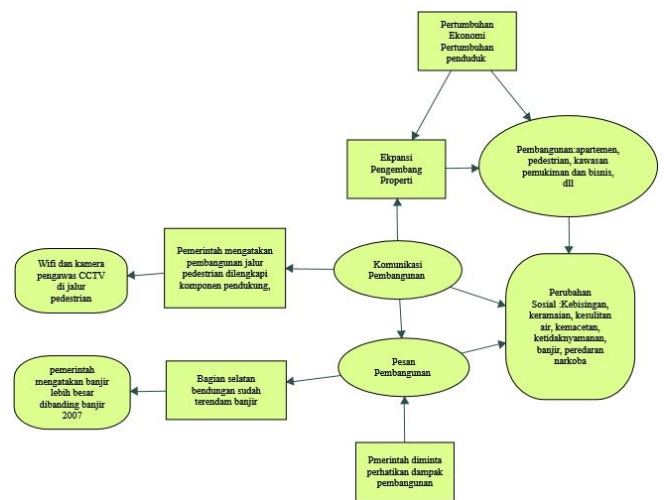
Terkait pembangunan yang dilakukan tersebut, pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan komunikasi kepada masyarakat agar program yang direncanakan dan dilaksanakan mencapai target. Hal itu menjadi

sangat penting mengingat permasalahan yang selama ini dihadapi adalah ketidaksinkronan antara pesan-pesan kepada masyarakat dan penerimaannya. Dalam kajian ini, terkait *agenda setting*, dikaji pula mengenai hubungan pesan pembangunan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan perubahan sosial. Pesan pembangunan bisa disampaikan melalui media massa untuk menjangkau masyarakat luas. Bagaimana kemudian pesan-pesan disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat.

Dari hasil analisis teks media yang menggunakan software Nvivo 11 mengungkapkan bahwa pesan-pesan pembangunan yang disampaikan adalah mengenai program-program pembangunan yang akan dan sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Pesan-pesan yang disampaikan tersebut antara lain pemerintah mengatakan ke depan akan membangun jalur pedestrian dengan tepi sungai atau saluran air sebagai wujud dari konsep *waterfront city*. Konsep ini akan memanfaatkan sungai sebagai arena rekreasi dan pertemuan antar warga. Pembangunan jalur pedestrian di jalur arteri juga difokuskan selama 2013-2017. Setiap pembangunan selalu mempunyai dampak lingkungan, sehingga pemerintah meminta kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

Selain pada program pembangunan, pesan-pesan pembangunan juga disampaikan Pemkot Bekasi pada saat terjadi bencana banjir. Sebagai daerah hilir, aliran Kali Bekasi selalu mendapatkan kiriman air dari Bogor sebagai daerah hulu. Hal itu jika tidak dikomunikasikan kepada warga dan tidak segera diantisipasi maka kerap terjadi banjir yang cukup parah. Oleh karena itu pesan-pesan pembangunan juga dilakukan. Seperti yang diberitakan di media massa, pemerintah mengatakan bahwa pesan air kiriman dari Bogor banyak, maka tanggul yang dibangun tidak mampu menahan arus pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi. Langkah yang dilakukan kemudian oleh Pemerintah adalah membendung Kali Bekasi, karena tinggi muka air kiriman sudah mencapai lima meter. Namun karena banyaknya luapan air tersebut, Kepala Bappeda Kota Bekasi menyampaikan bahwa hampir semua pemukiman warga yang berada di bantaran Kali Bekasi terkena banjir. Banjir di perumahan-perumahan Bekasi juga dilaporkan ketinggiannya mencapai 1,5 meter. Banjir yang kerap terjadi tersebut sebenarnya juga merupakan dampak dari pembangunan. Perijinan yang diberikan pemerintah kepada pengembang,

membuat pembangunan perumahan di dekat bantaran Kali Bekasi dilakukan, sehingga pada jangka waktu yang rutin secara terus menerus pada musim penghujan perumahan mereka dilanda banjir. Selain banjir, pembangunan juga kerap menimbulkan dampak lingkungan lainnya, seperti meningkatnya pembuangan sampah dan limbah dari sekitar kawasan tersebut yang mengakibatkan warga di sekitar perumahan terkena dampaknya.



Gambar 2 Hubungan Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial (Sumber: Data diolah dengan Nvivo 11)

Berdasarkan hal tersebut, dari analisis yang dilakukan dengan *software* Nvivo 11 menyebutkan bahwa masalah-masalah yang timbul dari pembangunan seperti yang disebutkan pada berita-berita di media tersebut adalah pembangunan apartemen yang berada di lokasi resapan air dan penampungan air, sehingga warga khawatir genangan air tinggi di musim hujan serta air sulit di musim kemarau. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, dampak lingkungan yang terjadi sudah seharusnya dijaga bersama oleh semua pihak termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dan yang tinggal di sekitarnya. Dalam bagannya, dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2 tersebut dapat dilihat bagan pesan yang dikomunikasikan kepada masyarakat tentang pembangunan dan masalah maupun dampak pembangunan. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penduduk di Kota Bekasi, pembangunan apartemen, pedestrian, kawasan bisnis dan perumahan juga perlu dibangun. Pembangunan tersebut juga dipicu oleh adanya ekspansi pengembangan properti di Bekasi. Pembangunan yang dilakukan membawa dampak terhadap perubahan sosial seperti keramaian, ketidaknyamanan,

kemacetan, hingga kesulitan air. Hal itu kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat. Dalam menyampaikan pesannya ada dua hal yang penting, yakni mengenai program pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat serta bagaimana mengatasinya, misalnya dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut.

Agenda setting dan Perubahan Sosial

Ada tiga hal yang diperhatikan dalam *agenda setting* ini, yakni agenda media, agenda pemerintah, dan agenda publik. Agenda media adalah perencanaan yang dilakukan oleh media dalam menuliskan berita di media. Topik pemberitaan dan isinya merupakan bagian dari pertimbangan seluruh jajaran redaksi di media tertentu. Agenda pemerintah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana pesan-pesan pemerintah dimuat oleh media massa agar dapat memberikan informasi dan pengaruh kepada perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Agenda pemerintah yang dimasukkan dalam berita-berita di media bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap suatu program agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama dengan yang dimaksud oleh pemerintah. Sementara agenda publik yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana masyarakat memiliki peran dalam menentukan rencana program, pelaksanaan dan bahkan sampai pada evaluasi pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang penting dari setiap program yang dilakukan oleh pemerintah.

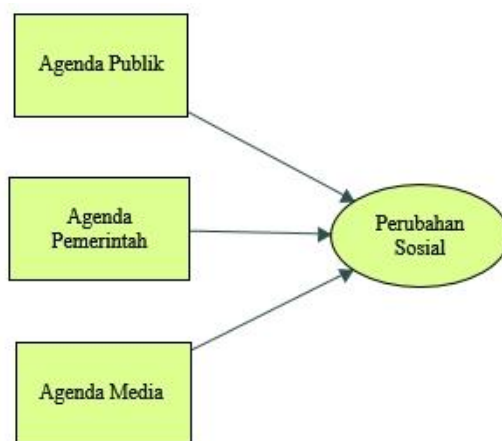
Dengan menggunakan software Nvivo 11, dari hasil analisis 10 berita di atas, mengungkapkan bahwa ditemukan faktor-faktor yang menghubungkan agenda pemerintah dan perubahan sosial sebagai berikut:

- Pemerintah menargetkan pembangunan jalur pedestrian minimal 1 km per tahun (x), maka pembangunan jalur pedestrian dibangun di jalan protokol (y)
- Pemerintah membangun jalur pedestrian dilengkapi komponen pendukung (x), maka fasilitas dilengkapi dengan wifi dan CCTV (y)
- Pemerintah menargetkan selesaikan pembangunan jalan (x), maka jalan pedestrian ramah bagi pejalan kaki (y)
- Pemerintah mengizinkan pembangunan apartemen (x), maka warga khawatir kesulitan air di musim kemarau dan banjir di musim penghujan (y)

- Pemerintah mengizinkan pembangunan pengembang kawasan (x), rumah warga tergenang banjir karena area serapan tertutup (y)
- Pemerintah memokuskan jalur pedestrian di jalan arteri pada 2013 hingga 2017
- Pemerintah merencanakan jalur pedestrian dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) (x), jalur pedestrian dengan konsep waterfront city di kawasan tepi sungai atau saluran air
- Pemerintah menetapkan status KLB (x), maka penanganan banjir dengan dana miliaran rupiah dapat segera dilakukan (y)

Sementara itu faktor-faktor yang menyebabkan hubungan antara agenda publik dan perubahan sosial, antara lain:

- Banjir mengepung wilayah pemukiman (x), maka pemerintah diminta memperhatikan dampak dari pembangunan (y).
- Pembangunan apartemen akan berdampak banjir (x), maka warga Bintara Indah menolak pembangunannya (y).



Gambar 3 Hubungan *Agenda setting* dan Perubahan Sosial (Sumber : Data diolah dengan Nvivo 11)

Sementara itu faktor-faktor yang menghubungkan agenda media dan perubahan sosial antara lain:

- *Angle* (sudut pandang) berita di media pada target Pemerintah Kota Bekasi dalam pembangunan jalur pedestrian, maka perubahan sosial yang akan terjadi pada pembangunan jalan.
- Pemerintah gencar melakukan penertiban bangunan liar, ruang terbuka hijau (RTH) menjadi lebih luas
- Warga meminta Pemerintah perhatikan banjir sebagai dampak pembangunan.
- Meluapnya Kali Bekasi yang paling parah, pemerintah rekomendasikan status KLB banjir.

- Banjir pada 21 April 2016 menjadi yang terparah sepanjang sejarah karena limpasan bendungan kalinya mencapai 780 meter kubik per detik.
- Banjir parah akibat luapan Kali Bekasi, ketinggian sudah lebih dari 4 (empat) meter.

Berdasarkan hasil analisis di atas, untuk lebih memahami dengan mudah hubungan antara agenda media, pemerintah dan publik dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3, baik agenda publik, agenda pemerintah, dan agenda media memiliki hubungan dengan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Ketiga agenda tersebut memiliki indikator masing-masing untuk melihat penonjolannya apakah agenda publik, agenda pemerintah, dan agenda media. Dalam agenda media, isu yang dibahas oleh media ditentukan oleh jumlah dan tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita dan panjangnya (waktu dan ruang). Tingkat penonjolan bagi khalayak (*audience salience*) dilihat dari relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Sedangkan pada cara pemberitaan dan cara penyajiannya dapat dilihat dari suatu topik atau berita. Agenda publik adalah naluri publik terhadap pentingnya suatu isu tertentu. Indikator dari agenda tersebut dapat dilihat dari derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu, relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi, dan pertimbangan senang atau tidak senang dengan topik berita yang dimuat di suatu media. Sementara pada agenda politik atau pemerintah, dilihat pada apakah berita tersebut dapat memengaruhi pembuat keputusan/ kebijakan atau tidak. Indikator dari agenda ini adalah kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu, kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan, dan nilai kegiatan yang dilakukan pemerintah.

KESIMPULAN

Pembangunan permukiman di Kota Bekasi jika ditinjau dari analisis *agenda setting* di media massa terlihat bahwa adanya penonjolan dari agenda pemerintah, akan tetapi dampaknya terhadap masyarakat juga menjadi fokus dan tema yang diberitakan di media massa. Berdasarkan analisis dengan menggunakan software Nvivo 11, terlihat adanya *agenda setting* yang terdiri dari agenda media, pemerintah, dan publik berhubungan dengan perubahan sosial masyarakat. Isu pembangunan yang diangkat di media mempunyai pengaruh terhadap

respon dan perubahan sosial di masyarakat. Namun antara agenda pemerintah dan agenda publik tidak ditemukan adanya hubungan, artinya masing-masing memiliki agenda yang direncanakan sendiri untuk diangkat dalam pemberitaan. Salah satu yang mencuat di beberapa berita tersebut adalah bahwa pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang dan evaluasi terhadap ijin pembangunan apartemen dan kawasan, karena hal tersebut memberikan dampak perubahan sosial yang besar terhadap masyarakat sekitarnya, khususnya jika dilihat dampak negatif dari pembangunan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi atas penyelesaian artikel ini yakni kepada Bapak Dr Ivanovich Agusta, MS yang telah mengajarkan software N Vivo sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu analisis penelitian, serta kepada LPDP BUDI DN yang memberikan bea siswa selama penulis menempuh studi di KMP IPB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. F. (1991). *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Aryanti, N. (2018). *Dampak Industrialisasi terhadap Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja: Penelitian Tentang Kriminalitas Pada Kalngan Remaja di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative data analysis with NVivo*. London: Sage Publications.
- D'Angelo, P., Pollock, J. C., Kiernicki, K., & Shaw, D. (2013). Framing of AIDS in Africa: Press-state relations, HIV/AIDS news, and journalistic advocacy in four sub-Saharan Anglophone newspapers. *Politics and the Life Sciences*, 32(02), 100–125. https://doi.org/10.2990/32_2_100
- Dekker, R., & Scholten, P. (2017). Framing the Immigration Policy Agenda. *The International Journal of Press/Politics*, 22(2), 202–222. <https://doi.org/10.1177/1940161216688323>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan oleh Dariyantno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from
- Effendi, I. K. (2017). *Analisis Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Kelurahan Mulyaharja Kota Bogor Sejak Pembangunan Perumahan Bogor Nirwana Residence*. IPB.
- Griffin, E. (2006). *A first look at communication theory*. A first look at communication theory (6th Ed). New York: McGraw-Hill.
- Hanafi, A. (1986). *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Herper, C. L. (1989). *Exploring Social Change*. New Jersey (US): Prentice-Hall, Inc.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). *Theories of human communication*. Waveland Press.
- McQuail, D. (1987). *Teori Komunikasi Massa, terj Agus Dharma dan Aminuddin Ram*. Jakarta: Erlangga.
- McQuarrie, E. F., Marshall, C., & Rossman, G. B. (1990). Designing Qualitative Research. *Journal of Marketing Research*, 27(3), 370. <https://doi.org/10.2307/3172595>
- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi pembangunan: Pengenalan teori dan penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pramana, I. (2017). Pembangunan Perumahan di Bekasi Utara Bikin Teluk Pucung Jadi Langganan Banjir. Retrieved May 19, 2017, from Pembangunan Perumahan di Bekasi Utara Bikin Teluk Pucung Jadi Langganan Banjir
- Quebral, N. C. (1988). *Development communication*. College of Agriculture University of Philippines.
- Rakhmat, J. (1999). *Rekayasa sosial: reformasi atau revolusi?* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rochajat, H., & Elvinaro, A. (2011). *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kristis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rogers, E. M. (1986). *Communication Technology: The New Media in Society*. New York: The Free Press.
- Rusyanto, E. (2015). Bekasi Diguyur 30 Proyek Apartemen. Retrieved July 2, 2016, from <http://www.beritasatu.com/properti/323040-bekasi-diguyur-30-proyek-apartemen.html>
- Subiakto, H., & Ida, R. (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suprihadi, M. (2016). Warga Tolak Apartemen Bintara Residence di Bekasi. Retrieved May 9, 2017, from <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/30/11371931/warga.tolak.apartemen.bintara.residence.di.bekasi>
- Todaro, M. P. (2000). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. In Haris Munandar (Ed.), *Economic Development* (ke Tujuh, pp. 1–353). Jakarta: Erlangga. <https://doi.org/2003>
- van den Akker, O., Fronek, P., Blyth, E., & Frith, L. (2016). ‘This neo-natal ménage à trois’: British media framing of transnational surrogacy. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 34(1), 15–27. <https://doi.org/10.1080/02646838.2015.1106454>
- Zamawe, F. C. (2015). The implication of using NVivo software in qualitative data analysis: Evidence-based reflections. *Malawi Medical Journal*, 27(1), 13–15.
- Zulfikar, W. (2017). Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Caraka Prabu*, 1(01), 58–77.